

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA YANG DIPALSUKAN

Oleh : AHMADUR RIFA'IE

Dosen Pembimbing Utama : YAYUK SUGIARTI, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping : IMAM ROFIQI, S.H., M.Kn.

Penelitian ini dilakukan karena asuransi jiwa memegang peranan penting, karena disamping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kerugian yang akan terjadi, asuransi memberikan dorongan yang besar sekali ke arah perkembangan ekonomi lainnya. Asuransi ini mengatur perjanjian antara dua pihak atau lebih antara penanggung yang mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, atas meninggalnya atau cacat yang dipertanggung.

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa serta Sebagai bahan kajian dan analisis untuk mengetahui tanggungjawab perusahaan asuransi terhadap polis yang di palsukan dilihat di dengar dan dialaminya.

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus di wujudkan ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah secara positif terumus jelas untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan manfaat bagi para pihak yang berperkara.

Hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pengaturan terkait perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi di Indonesia tersebut saling berjalan dan berkaitan satu sama lain untuk menjadi payung hukum bagi pemegang polis dalam mendapatkan hak-haknya. Selain itu Pelaku pemalsuan polis asuransi akan bertanggungjawab terhadap data polis asuransi yang dibuat dengan surat palsu berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku diantaranya terkait dengan kejahatan asuransi pada pemalsuan surat. Pelaku pemalsuan polis dilakukan melalui proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan pengadilan.

Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian atau adanya terlibat kejahatan keuangan yang dilakukan oleh istri pemilik polis, serta perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana dalam penegakan hukum, dan pemerintah terkhusus hakim harus tegas memberikan sanksi berupa hukuman lebih berat kepada setiap pelaku pemalsuan polis asuransi jiwa sehingga sanksi yang diberikan tersebut benar-benar bisa memberi efek jera bagi yang telah melakukannya dan bisa membuat takut bagi orang yang belum melakukan tindak pidana pemalsuan polis asuransi.

Kata Kunci : Pelindungan hukum, Pemegang Polis, Dipalsukan

ABSTRACK

LEGAL PROTECTION AGAINST FORGED LIFE INSURANCE POLICY

HOLDERS

By : AHMADUR RIFA'IE

Main Supervisor : YAYUK SUGIARTI, S.H., M.H.

Assistant Supervisor : IMAM ROFIQI, S.H., M.Kn.

This research was conducted because life insurance plays an important role, because apart from providing protection against possible losses that will occur, insurance provides a huge boost towards other economic developments. This insurance regulates an agreement between two or more parties between the insurers who bind themselves to the insured because of the loss, death or disability of the insured.

The purpose of this research is to determine the legal protection for life insurance policy holders and as material for study and analysis to determine the insurance company's responsibility for policies that are falsified by what they have heard and experienced.

This research uses normative juridical law, namely law as a norm, either identified with justice that must be realized or norms that have been realized as positive, clearly formulated orders to guarantee certainty and also in the form of norms that are the product of a judge at the time the judge decides. a case by taking into account the benefits for the parties involved.

From the results and discussion, it can be concluded that the regulations related to legal protection for insurance policy holders in Indonesia operate and are related to each other to become a legal umbrella for policy holders to obtain their rights. Apart from that, perpetrators of falsifying insurance policies will be responsible for the insurance policy data made with fake letters based on applicable legal provisions, including those related to insurance crimes involving falsifying letters. Perpetrators of policy falsification are carried out through the process of investigation, prosecution, court hearings and implementation of court decisions.

The Financial Services Authority to provide for violations of laws and regulations in the insurance sector or involvement in financial crimes committed by the wife of the policy owner, as well as the need to improve facilities and infrastructure in law enforcement, and the government, especially judges, must firmly provide sanctions in the form of heavier penalties to each perpetrators of falsifying life insurance policies so that the sanctions given can really have a deterrent effect on those who have done it and can scare people who have not committed the crime of falsifying insurance policies.

Keywords: *Legal protection, Policy Holder, Fake*